

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERUBAHAN
PEMANFAATAN LAHAN BEKAS PERTAMBANGAN MENJADI
KAWASAN PARIWISATA DI KOTA SAWAHLUNTO**


(Rahmadian Novira 1210113072, *Fakultas Hukum Universitas Andalas*, 66 halaman,
2016)

Pembimbing : Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H. dan Hendria Fitriana, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pertambangan merupakan kegiatan pembukaan lahan yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan disekitarnya. Di Kota Sawahlunto dimana pertambangan batubara telah meninggalkan dampak dan perubahan struktur serta bentuk lahan yang berbeda dari asalnya. Dalam upaya pemulihan lahan dan pemanfaatan kawasan bekas pertambangan. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto merubah fungsi lahan bekas pertambangan itu menjadi kawasan pariwisata agar tetap memberikan pemasukan bagi Kota Sawahlunto. Yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam perubahan pemanfaatan lahan bekas pertambangan menjadi kawasan pariwisata di Kota Sawahlunto. (2) Apa saja manfaat yang diperoleh atas perubahan pemanfaatan lahan bekas pertambangan menjadi kawasan pariwisata bagi pemerintah Kota Sawahlunto. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara semi struktur. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa: *Pertama* Walikota Sawahlunto Ir. Amran Nur berencana menjadikan Kota Sawahlunto sebagai kota wisata dengan mengambil kebijaksanaan menghentikan kegiatan pertambangan di Kota Sawahlunto. Dengan merubah lahan bekas tambang menjadi resort wisata sebagaimana yang dicantumkan pada ketentuan Perda Rencana Tata Ruang Kota Sawahlunto No. 7 Tahun 2004. *Kedua* Manfaat atas perubahan pemanfaatan lahan bekas pertambangan menjadi kawasan pariwisata bagi pemerintah Kota Sawahlunto yaitu meningkatnya PAD Kota Sawahlunto, berkurangnya pengangguran, sehingga turunya angka kemiskinan dan penataan kota yang lebih baik.

Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Lahan Bekas Pertambangan

	No. Alumni Universitas	Rahmadian Novira	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir : Padang, 30 November 1993	f) Tanggal Lulus : 13 April 2016	
	b) Nama Orang Tua : Idrusman dan Dien Nelis	g) Predikat Lulus : Dengan Pujian	
	c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3,72	
	d) PK : Hukum Administrasi Negara (PK VIII)	i) Lama Studi : 3 Tahun 8 Bulan	
	e) No. Bp : 1210113072	j) Alamat : Jl. Proklamasi No. 6A Padang	

Rahmadian Novira, BP 1210113072, Fakultas Hukum Unand. Pembimbing : Hj. Sri Arnetti S.H, M.H dan Hendria Fithrina S.H, M.H. Tahun 2016, 65 Halaman

ABSTRAK

Pertambangan merupakan kegiatan pembukaan lahan yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan disekitarnya. Di Kota Sawahlunto dimana pertambangan batubara telah meninggalkan dampak dan perubahan struktur serta bentuk lahan yang berbeda dari asalnya. Dalam upaya pemulihan lahan dan pemanfaatan kawasan bekas pertambangan. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto merubah fungsi lahan bekas pertambangan itu menjadi kawasan pariwisata agar tetap memberikan pemasukan bagi Kota Sawahlunto. Yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam perubahan pemanfaatan lahan bekas pertambangan menjadi kawasan pariwisata di Kota Sawahlunto. (2) Apa saja manfaat yang diperoleh atas perubahan pemanfaatan lahan bekas pertambangan menjadi kawasan pariwisata bagi pemerintah Kota Sawahlunto. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara semi struktur. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa: *Pertama* Walikota Sawahlunto Ir. Amran Nur berencana menjadikan Kota Sawahlunto sebagai kota wisata dengan mengambil kebijaksanaan menghentikan kegiatan pertambangan di Kota Sawahlunto. Dengan merubah lahan bekas tambang menjadi resort wisata sebagaimana yang dicantumkan pada ketentuan Perda Rencana Tata Ruang Kota Sawahlunto No. 7 Tahun 2004. *Kedua* Manfaat atas perubahan pemanfaatan lahan bekas pertambangan menjadi kawasan pariwisata bagi pemerintah Kota Sawahlunto yaitu meningkatnya PAD Kota Sawahlunto, berkurangnya pengangguran, sehingga turunnya angka kemiskinan dan penataan kota yang lebih baik.

Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Lahan Bekas Pertambangan

Skripsi ini telah dipertahankan di depan penguji dan dinyatakan lulus pada 13 April 2016.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn	Darnis, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : **Syofiarti, S.H., M.Hum**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan

